PENGARUH PEMBENTUKAN *CIVIC SKILLS* TERHADAP TINGKAT ASPIRASI PEMILIH PEMULA DI SMA AL-KAUTSAR KOTA BANDAR LAMPUNG

Tubagus Ali Rachman Puja Kesuma
STKIP PGRI Bandar Lampung

Abstrack

Political education, especially in the concept of political culture for citizens who become first-time voters is a shared responsibility. In the implementation of democracy in Indonesia, particularly citizen voters should have the skills of citizenship is good to be able to channel their aspirations well.

The purpose of this study was to clarify the effect is the formation of civic skills to the level of the political aspirations of a class XI student voters at Al-Kautsar senior high School in the city of Bandar Lampung. Methods This was a descriptive correlational study, this sample is a class XI student who has become a first-time voters in Al-Kautsar senior high School in Bandar Lampung, amounting to 68 people, the data collection techniques used is to test and questionnaire data processing is then performed through the analysis of SPSS statistical version of 17:00.

Civic Skills affect the level of the political aspirations of the students, It is based on the calculation of the path coefficient $\rho > 0$ is obtained $\rho 2 = 0.703$ with a significance above 0.485 and the significance level $\alpha = 0.05$ level real thus significantly influential variables.

Keywords: civic skills, aspirations of first-time voters

PENDAHULUAN

Sangat penting membangun keterampilan warga negara (*civics skill*) dalam berpolitik sejak awal sekolah dan terus berlanjut selama masa sekolah dalam rangka pembentukan warga negara yang baik dan cerdas (*good & smart citizen*). Siswa dapat belajar berinteraksi dengan kelompok-kelompok kecil dalam rangka mengumpulkan informasi, bertukar pikiran, dan menyusun rencana-rencana tindakan sesuai dengan taraf kedewasaan mereka. Mereka dapat belajar untuk menyimak dengan penuh perhatian, bertanya secara efektif, dan mengelola konflik secara mediasi, kompromi, atau menjalin konsensus. Siswa juga seyogyanya mengembangkan kecakapan-kecakapan memonitor dan mempengaruhi kebijakan publik. Mereka hendaknya belajar bagaimana meneliti isu-isu politik melalui media elektronik maupun media massa.

Pendidikan politik bagi warga negara yang menjadi pemilih pemula merupakan tanggung jawab bersama. Pendidikan merupakan usaha sadar membimbing anak kearah kesempurnaan baik jasmani maupun rohani. Pendidikan berusaha untuk mengembangkan potensi yang telah ada pada anak dengan memberi bekal sebaik mungkin agar anak tersebut berpikir serta bertanggungjawab terhadap segala aktifitas yang dilakukan sebagai makhluk yang ber-Tuhan dan makhluk sosial.

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal tempat berlangsungnya interaksi belajar mengajar antara guru dan siswa serta beberapa perangkat belajar lainnya. Di sekolah siswa mendapatkan berbagai bantuan dan bimbingan terutama dari guru melalui penyampaian informasi berupa pengetahuan, keterampilan dan pembentukan sikap atau perilaku politik yang sesuai demi tercapainya warga negara yang baik dan cerdas (*good & smart citizen*).

SMA Al-Kautsar Kota Bandar Lampung merupakan salah satu sekolah yang terkemuka di provinsi Lampung. Para siswanya pun tak hanya berasal dari sekitar wilayah Bandar Lampung namun juga banyak yang berasal dari luar wilayah bandar Bandar Lampung, bahkan banyak juga yang berasal dari wilayah Palembang provinsi Sumatera Selatan. Hal ini terbukti dengan adanya asrama bagi para siswa. Dengan beragamnya asal usul siswa-siswi di perguruan Al-Kautsar tentu sangat mempengaruhi partisipasi politik mereka terutama saat PEMILU baik PEMILUKADA maupun PEMILU Nasional. Hal ini dikarenakan, walaupun usia mereka telah mencapai 17 tahun namun mereka acuh tak acuh untuk mengurus kartu tanda penduduk (KTP) sebagai prasyarat untuk menjadi pemilih dalam pemilu dengan alasan jauhnya tempat

tinggal untuk membuat KTP. Namun banyak juga yang berpendapat bahwa enggan untuk menyalurkan aspirasinya dikarenakan tidak mengetahui alur/tata cara/ prasyarat untuk menjadi pemilih dalam pemilu.

Partisipasi dalam pemilu merupakan tujuan akhir dari pendidikan politik khususnya materi konsep budaya politik yang dibelajarkan pada siswa kelas XI SMA Al-Kautsar yang rata-rata telah berusia 17 tahun agar mereka antusias terhadap PEMILU sebagai wujud demokratisasi indonesia. Para siswa-siswi kelas XI SMA Al-Kautsar yang telah menjadi pemilih pemula perlu dibekali dengan pendidikan politik yang mumpuni agar mampu memaksimalkan partisipasi politik mereka terutama dalam kancah PEMILU sebagai wujud demokratisasi warga negara. Selain itu, penguasaan pendidikan politik yang mumpuni sangat berguna untuk mencegah manipulasi suara dalam PEMILU karena mereka adalah sasaran empuk bagi peminat suara (politik) yang menginginkan kemenangan dalam pemilu. Tak jarang banyak ditemui kasus pelaksanaan kampanye yang dilakukan disekolah, meski melanggar peraturan yang ada namun hal tersebut sering kita jumpai demi mendapatkan suara politik sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, pada jenjang ini mata pelajaran PKn membekali siswa dengan materi budaya politik untuk mengantisipasi hal tersebut.

"Siswa/siswa adalah Seseorang yang terdaftar pada sebuah lembaga pendidikan dan mengikuti suatu jalur studi" (A person registrered in an education and pursuing a course of study, Asa S. Knowles, Editor-in-Chief, The International Encyclopedia of Higher Education, Volume 1, 1977). Siswa merupakan input dalam organisasi sekolah dan bahan mentah yang harus diolah oleh sekolah untuk menjadi input yang berkualitas pada jenjang pendidikan berikutnya. Menurut Asri Budiningsih (2008;5) "Siswa/ peserta didik adalah manusia yang identitas insaninya sebagai subjek yang berkesadaran perlu dibela dan ditegakan lewat sistem dan model pendidikan yang bersifat bebas dan egaliter". Untuk itu siswa harus dipandang secara filosofis, yaitu menerima kehadiran kelakuannya, keindividuannya, sebagaimana mestinya ia ada (eksistensinya).

Menurut Piaget dalam Asri Budiningsih (2008: 37) pendapat bahwa tahap dan perkembangan kognitif anak dibagi menjadi:

1) 0 - 2 tahun disebut sebagai tahap sensorimotor. Pertumbuhan kemampuan anak tampak dari kegiatan motorik dan persepsinya yang sederhana. Ciri pokok perkembangannya berdasarkan tindakan yang dilakukan langkah demi langkah.

2) 2 – 7/8 tahun disebut tahap preoperasional. Ciri pokok perkembangannya adalah pada penggunaan symbol atau bahasa tanda, dan mulai berkembangnya konsep intuitif.
3) 7/8 – 11/12 disebut masa operasional. Ciri pokok perkembangannya adalah anak sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis, dan ditandai reversible dan kekekalan.
4) 11/12 – 18 tahun disebut dengan tahap operasional formal. Ciri pokok perkembangannya anak sudah mampu berpikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola pikir "kemungkinan".

Siswa menurut status dan tingkat kemampuan diatas diartikan dengan keadaan siswa dipandang secara umum dalam kemampuannya (kecerdasannya). Berdasarkan uraian-uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud siswa adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Miriam Budihardjo (2000: 8) mendefinisikan bahwa "Politik *(politics)* adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu". Untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan kebijaksanaan-kebijaksaan umum yang menyangkut pengaturan dan pembagian dan alokasi dari sumber-sumber yang ada. Untuk itu perlu dimiliki kekuasaan dan kewenangan yang akan dipakai baik untuk membina kerjasama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini.

Karl W. Deutsch seperti dikutip oleh Miriam Budihardjo (2000: 12) mengemukakan bahwa "Politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum". Keputusan-keputusan ini berbeda dengan pengambilan keputusan pribadi oleh orang seseorang dan keseluruhan dari keputusan itu merupakan sektor umum atau sekotor publik dari suatu negara.

Almond dan Verba dalam Rahman (2007;269) menjelaskan dalam melihat bahwa pandangan tentang obyek politik, terdapat tiga komponen yakni komponen kognitif, efektif, dan evaluatif.

- ***Orientasi kognitif*** : yaitu berupa pengetahuan tentang dan kepercayaan pada politik, peranan dan segala kewajibannya serta input dan outputnya.
- ***Orientasi afektif*** : yaitu perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktor dan pe-nampilannya.

- ***Orientasi evaluatif*** : yaitu keputusan dan pendapat tentang obyek-obyek politik yang secara tipikal melibatkan standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan. Oleh karena itu kebudayaan politik adalah bagian dari kebudayaan suatu masyarakat. Dalam kebudayaannya sebagai sub kultur, kebudayaan politik dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat secara umum. Kebudayaan politik menjadi penting di pelajari karena ada dua sistem :
  1. **Pertama** : Sikap warga negara terhadap orientasi politik yang menentukan pelaksanaan sistem politik. Sikap orientasi politik sangat mempengaruhi bermacam-macam tuntutan itu di utarakan, respon dan dukungan terhadap golonganm elit politik, respons dan dukungan terhadap rezim yang berkuasa.
  2. **Kedua** : dengan mengerti sikap hubungan antara kebudayaan politik dan pelaksanaan sisitemnya, kita akan lebih dapat menghargai cara-cara yang lebih membawa perubahan sehingga sisitem politik lebih demokratis dan stabil

"Lahirnya budaya politik itu sebagai pantulan langsung dari keseluruhan sistem sosial-budaya masyarakat. Hal ini terjadi melalui proses sosialisasi politik agar masyarakat mengenal, memahami, dan menghayati nilai-nilai lain yang hidup dalam masyarakat itu, seperti nilai-nilai sosial budaya dan agama". (Alfian, 2008; 35)

Dalam sistem pemerintahan yang demokratis muncul berbagai aspirasi rakyat, termasuk aspirasi politik sebagai wujud kebebasan rakyat. Aspirasi itu menyuarakan ide dan pendapatnya dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Akibatnya, muncullah berbagai macam partai politik dengan berbagai aspirasi yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi sikap dan cara berpolitik para pendukungnya.Berkembangnya aspirasi dan tuntutan politik merupakan dinamika dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara dalam memperjuangkan kedaulatan rakyat yang menyangkut hak dan kewajiban warga negara untuk berperan aktif dalam menentukan kebijakan negara.

Aspirasi merupakan harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang. Aspirasi politik dalam masyarakat dapat disalurkan dalam bentuk partisipasi politik. Michael Rush dan Philip Althoff seperti dikutip oleh Rafael Raga Maran (2001:147) partisipasi politik dianggap sebagai akibat dari aspirasi politik. Partisipasi politik merupakan usaha terorganisir oleh para warganegara untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijaksanaan umum.

Selanjutnya, menurut Mariam Budiardjo (2000:161) menyatakan bahwa "partisipasi politik mencakup semua kegiatan sukarela melalui mana seseorang turut serta dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik dan turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pembentukan kebijksanaan umum". Kegiatan-kegiatan ini mencakup kegiatan memilih dalam pemilihan umum, menjadi anggota suatu golongan politik tertentu, kelompok penekan, kelompok kepentingan, duduk dalam lembaga politik, berkampanye, dan menghadiri kelompok diskusi.

Pendidikan Kewarganrgaraan (PKn) menurut pasal 39 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam dalam Sujarwo (2011:59) bahwa " Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar hubungan warga negara dengan pemerintah agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara ".

Pengertian senada dikemukakan oleh CICED *(Centre For Indonesian Civic Education)* dalam dalam Sujarwo (2011:59), bahwa yang dimaksud dengan Pendidikan Kewarganegaraan adalah " Pendidikan Kewarganegaraan merupakan proses tranformasi yang membantu membangun masyarakat yang heterogen menjadi kesatuan masyarakat Indonesia, mengembangkan warga negara Indonesia yang memiliki pengetahuan dan kepercayaan terhadap Tuhan, memiliki kesadaran terhadap hak dan kewajiban, baik kesadaran hukum, memiliki sensitivitas politik, berpartisipasi politik dan masyarakat madani *(civil society)* "

Sebagaimana lazimnya suatu bidang studi yang diajarkan di sekolah, materi kajian mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan mencakup dimensi pengetahuan *(knowledge)*, keterampilan *(skill)*, dan nilai *(values)*. Hal ini sesuai dengan ide pokok mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang ingin membentuk warga negara yang memiliki keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai yang sesuai dengan konsep-konsep dan prinsip kewarganegaraan. Pada gilirannya, warga negara yang baik tersebut diharapkan dapat membantu terwujudnya masyarakat yang demokratis dan konstitusional.

Menurut Pasal 19 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008, hak memilih warga negara dalam hal ini yaitu pemilih pemula diatur sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah atau pernah kawin mempunyai hak memilih.

2. Warga Negara Indonesia sebagaiman dimaksud pada ayat (1) didaftar oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih.

Selanjutnya, pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 disebutkan bahwa untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat ditarik suatu pengertian bahwa pemilih pemula adalah warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 tahun atau lebih dan sudah atau pernah kawin mempunyai hak memilih dan telah terdaftar sebagai pemilih dalam penyelenggaraan pemilu. Artinya bahwa pemilih pemula adalah pemilih yang pada penyelenggaraan pemilu dimulai dirinya telah terdaftar sebagai pemilih oleh penyelenggara pemilu dan telah genap berumur 17 tahun saat hari penyelenggaraan pemilu dan dia boleh menggunakan hak pilihnya.

METODOLOGI

Metode penelitian ini adalah deskripsi korelasi yaitu salah satu penelitian yang dipergunakan untuk melihat tingkat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat secara satu persatu menggunakan korelasi sederhana, serta berusaha memaparkan hubungan faktor-faktor atau berbagai variabel yang mempengaruhi keadaan tanpa memanipulasi variabel tersebut.

Jenis penelitian ini adalah *expost facto* yaitu yang dirancang untuk menentukan tingkat hubungan dimana variabelnya sudah terjadi sebelumnya dan tidak memberikan manipulasi langsung terhadap variabel bebasnya. Variabel-variabel yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) pembentukan *civic skills*, dan (2) tingkat aspirasi politik pemilih pemula.

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI SMA Al-Kautsar Bandar Lampung karena pada jenjang kelas ini umur siswa genap rata-rata genap berusia 17 tahun yang berarti secara konstitusi mereka berhak ikut serta dalam pemilu untuk pertama kalinya sebagai salah satu wujud partisipasi politik dalam demokratisasi indonesia yang berjumlah 271 orang. Sampel dalam dalam penelitian ini adalah *Stratified Proporsional Random Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel secara berstrata yang dalam penelitian ini strata didasarkan pada jumlah pemilih pemula per kelas. Dalam menentukan besarnya sampel, peneliti berpedoman pada pendapat Suharsimi Arikunto yang selanjutnya jumlah sampel yang akan diambil oleh peneliti adalah sebesar 25% dari jumlah populasi. Jumlah populasi sebesar 271, sehingga dengan demikian peneliti mengambil sampel 25 % dari 271 adalah

67,75 dan dibulatkan menjadi 68. jadi yang dijadikan sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 68 orang.

Selanjutnya untuk memperoleh data penelitian digunakan teknik angket, kemudian dilakukan pengolahan data yang sebelumnya terlebih dahulu dilakukan pengujian persyaratan analisis berupa uji validitas, reliabilitas, Normalitas, homegenitas, yang selanjutanya dianalisis secara statistik dengan menggunakan analisis korelasi untuk mengukur hubungan antara variabel bebas dan terikat dengan menggunakan rumus *Product Moment (Pearson)* dan *SPSS for windows 17.*

HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Beradasarkan pengujian data dapat diketahui besarnya pengaruh langsung dan tidak langsung pembentukan civic skills terhadap tingkat aspirasi politik pemilih pemula di SMA Al-Kautsar Kota Bandar Lampung. Sedangkan besarnya hubungan antar variabel bebas dan terikat dapat diketahui dengan menggunkan analisis regresi. Adapun besarnya pengaruh pembentukan civic skills (X) terhadap tingkat aspirasi politik pemilih pemula (Y) dapat dilihat pada diagram sebagai berikut:

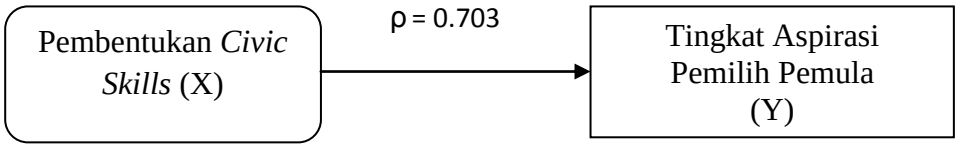

Diagram tersebut menunjukan bahwa antara X_2 terhadap Y = 0,703 mempunyai hubungan erat dan signifikan.

Secara umum berdasarkan hasil tes kepada siswa sebagai sampel dapat diketahui bahwa pembentukan *Civic Skills* berdasarkan pada kategori cukup/ sedang yaitu sebanyak 41,2% dari jumlah reponden, hal ini menunjukan bahwa siswa telah berupaya berwawasan luas, efektif dan bertanggungjawab antara lain adalah keterampilan berpikir kritis, yang meliputi kecakapan-:mengidentifikasi, mendeskripsikan, menjelaskan, mengevaluasi pendapat, menentukan dan mempertahankan sikap dan pendapat berkenaan dengan persoalan- persoalan public. Kecakapan berpartisipasi merupakan kompetensi yang harus di miliki oleh siswa, dimulai dalam kegiatan pembelajaran PKn. Siswa dapat belajar berinteraksi dalam kelompok, menghimpun informasi, bertukar pandangan atau merumuskan rencana tindakan sesuai dengan

tingkat kematangannya. Siswa dapat belajar mendengarkan dengan penuh perhatian, bertanya dengan efektif, dan menyelesaikan konflik melalui mediasi, kompromi atau membuat kesepakatan. Kemapanan berpikir siswa setelah di sekolah menengah atas diharapkan dapat mengembangkan kecakapan memantau kebijakan publik. Kecakapan intelektual dan berpartisipasi merupakan kecakapan yang menjadi kompetensi siswa dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Keterampilan Kewarganegaraan *(Civic skills*) merupakan komponen kedua dalam pendidikan kewarganegaraan yang harus diberikan kepada siswa sebagai bekal pengetahuan menjadi warganegara yang baik, komponen ini berkaitan dengan keterampilan atau perilaku apa yang harus dilaksanakan oleh warganegara. Komponen keterampilan kewarganegaraan diwujudkan dalam bentuk perilaku tehadap struktur dasar sistem kehidupan bermasyarakat, berpolitik, berpemerintahan, berbangsa dan bernegara Dalam hal ini siswa sebelumnya dibekali dengan pengetahuan yang harus dimiliki sorang warganegara yang berdemokratis antara lain; konsep, prinsip dan nilai demokrasi, konsep kewaraganegaraan, hak dan kewajiban warganegara serta politik dan pemerintahan.Pembekalan materi akan membantu siswa menjadi cerdas dalam membuat pertimbangan yang luas dan penuh nalar tentang tentang hakekat kehidupan politik di Indonesia baik.

Berdasarkan pengolahan data, aspirasi politik pemilih pemula yang dilaksanakan oleh responden paling banyak berada pada posisi tingkat aspirasi politik pemilih pemula cukup baik yaitu sebesar 38,2% dari jumlah responden. Sebagaian besar pada dasarnya sudah memiliki tingkat aspirasi politik yang cukup baik, artinya bahwa siswa telah mampu menyuarakan ide dan pendapatnya dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Berkembangnya aspirasi dan tuntutan politik merupakan dinamika dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara dalam memperjuangkan kedaulatan rakyat yang menyangkut hak dan kewajiban warga negara untuk berperan aktif dalam menentukan kebijakan negara. Aspirasi politik merupakan sebuah cara yang dilakukan orang untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintahan. Dengan adanya aspirasi-aspirasi yang diserap oleh partai-partai politik ini. Maka proses perbaikan dan kemajuan bangsa diharapkan bisa berkembang di masa yang akan datang. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis muncul berbagai aspirasi rakyat, termasuk aspirasi politik sebagai wujud kebebasan rakyat. Aspirasi itu menyuarakan ide dan pendapatnya dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Akibatnya, muncullah berbagai macam partai politik dengan berbagai

aspirasi yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi sikap dan cara berpolitik para pendukungnya. Berkembangnya aspirasi dan tuntutan politik merupakan dinamika dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara dalam memperjuangkan kedaulatan rakyat yang menyangkut hak dan kewajiban warga negara untuk berperan aktif dalam menentukan kebijakan negara.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pengujian terhadap hipotesis yang dilakukan oleh peneliti serta hasil pembahasan, secara umum dapat disimpulkan bahwa pembentukan *civic skills* dapat berpengaruh terhadap tingkat aspirasi pemilih pemula di SMA Al-Kautsar secara positif dan signifikan, ini berdasarkan pada temuan bahwa pembentukan *civic skills* siswa berpengaruh langsung terhadap tingkat aspirasi politik siswa SMA al-kautsar sebagai pemilih pemula secara positif, erat dan signifikan, hal ini menunjukkan bahwa semakin baik semakin baik *civic skills* siswa akan ada kecenderungan tingkat aspirasi politik siswa SMA al-kautsar sebagai pemilih pemula yang baik pula.

DAFTAR PUSTAKA

Alfian, Ilham Arifin. 1998. *Sistem Politik Indonesia*. Surabaya: LPM IKIP.

Almond dan Verba, 1990, *Budaya Politik, Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara.* Jakarta: Bumi Aksara.

Branson Margareth S. 1999. *Belajar Civic Education dari Amerika Serikat*. Terjemahan Syafrudin, M dkk. Yogyakarta: LKIS.

Budiarjo Miriam.2000. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Budiningsih, Asri .2008. *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Rafael Raga Maran, 2001. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Rahman H. 2007. *Sistem Politik Indonesia,* Yogyakarta ; Graha Ilmu,

Sujarwo (2011). *Pengaruh Kemampuan Guru Dalam Memahami Konsep Demokrasi dan Kemampuan Penerapan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Pembentukan Intellectual Citizenship*. Program Pascasarjana Universitas Lampung. Tidak diterbitkan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008. *Tentang Pemilu.* www.scribd.com/doc/.../UU-No-10-Tahun-2008-Tentang-Pemilu [7 April 2012]

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003. *Tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD*. www.tempo.co.id/hg/peraturan/2004/03/.../prn,20040316-04,id.html [8 April 2012]

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007. *Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa*. uk.staff.ugm.ac.id/atur/Permen16-2007KompetensiGuru.pdf. [9 April 2012]

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. *tentang Penyelenggara Pemilihan Umum*. www.pendidikan-diy.go.id/file/mendiknas/22.pdf. [6 April 2012]

UUSPN.2003. *Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS.* Bandung: Citra Umbara.

Biodata Penulis:
Tubagus Ali Rachman Puja Kesuma, S.Pd, M.Pd. adalah staff pengajar Program Studi Pendidikan Sejarah STKIP-PGRI Bandar Lampung. Lahir di Sritejo Kencono 23 Agustus 1988, menyelesaikan S-1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Lampung tahun 2010 dan S-2 Pendidikan IPS Universitas Lampung tahun 2012.